

LAPORAN
KEMAJUAN PENELITIAN




DETERMINAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
DARI PERSPEKTIF NON KEUANGAN

Disusun Oleh:

Drs. Agus Endro Suwarno, M.Si	NIK/NIDN: 491/06-1110-5901
Alfina Shinta Dilas Chaniago	NIM: B 200 160 151 (Anggota)
Siwi Dwi Kusumaningsari	NIM: B 200 160 152 (Anggota)

PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
MARET, 2020

	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Area Aktivitas Kerjasama dan Penelitian (AL) Fungsi Penelitian (FPL)	Tanggal Berlaku: 2 Januari 2016 Tanggal Revisi: 28 Desember 2015 Kode Dokumen: FM-UMS-AL-FPL-PP2M-06-07/R1
---	------------------------------------	--	--

FORMULIR PERNYATAAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Dosen Pengusul	: Drs. Agus Endro Suwarno, M.Si
NIK/NIDN	: 491/06-1110-5901
Alamat	: Krapyak RT 03 RW VII, Pucangan, Kartasura
Telp/HP	+62-857-8672-5608
Prodi, Fakultas	Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan mengadakan (penelitian/~~pengabdian~~)* PID dengan mahasiswa tersebut di bawah ini dengan judul penelitian: *Determinan Corporate Social Responsibility* dari Perspektif Non Keuangan

Nama Mahasiswa Mitra Kolaborasi	: (1) Alfina Shinta Dilas Chaniago (NIM B 200 160 151) (2) Siwi Dwi Kusumaningsari (NIM B 200 160 152)
Tahun Pelaksanaan Penelitian / Pengabdian *	: 2020

Surakarta, 3 Februari 2020

Mahasiswa I



(Alfina Shinta Dilas Chaniago)

Mahasiswa II



(Siwi Dwi Kusumaningsari)

Dosen Pengusul



(Drs. Agus Endro Suwarno, M.Si)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
FORMULIR PERNYATAAN KOLABORASI	iii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kontribusi Penelitian	4
E. Target Luaran	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 6
A. Teori Sinyal.....	6
B. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	6
C. Teori Legitimasi	7
D. <i>Corporate Social Responsibility</i>	7
E. Komite Audit.....	9
F. Dewan Direksi	10
G. Dewan Komisaris	10
H. Dewan Komisaris Independen.....	11
I. Kepemilikan Manajerial.....	12
J. Kepemilikan Asing.....	12
K. Kepemilikan Institusional	13
L. Kinerja Lingkungan.....	14
M. Tipe Industri	15
N. Pengungkapan Media.....	16
O. Kerangka Pemikiran	17
P. Pengembangan Hipotesis.....	18

BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Desain Penelitian.....	26
B. Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel.....	26
C. Jenis Data dan Sumber Data	26
D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	27
E. Metode Analisis Data	29
 BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	 32
A. Anggaran Biaya.....	32
B. Jadwal Penelitian.....	32
 DAFTAR PUSTAKA	 33
 LAMPIRAN.....	 35

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan *corporate social responsibility* dari perspektif non-keuangan yaitu struktur organisasi: komite audit, dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan meliputi: kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kinerja lingkungan, tipe industri, dan pengungkapan media. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2015-2019.

Instrumen penelitiannya berupa data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis menggunakan uji regresi linier berganda.

Target luaran penelitian PID adalah artikel yang didesiminasikan pada The 12th URECOL 2020 atau Seminar Nasional dan The 7th Call For Syariah Paper (SANCALL) 2020 di FEB UMS.

Kata Kunci: *corporate social responsibility*, struktur organisasi, kepemilikan, kinerja lingkungan, tipe industri, pengungkapan media.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era milenial saat ini setiap perusahaan yang telah berdiri pasti mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh dan meningkatkan laba semaksimal mungkin demi kelangsungan hidup perusahaan dan para pihak yang berkepentingan. Seiring perkembangan dalam dunia bisnis dan teknologi yang semakin pesat, perusahaan harus terus mengembangkan sumber daya yang dimiliki, sehingga mampu bersaing dalam dunia bisnis yang kompetitif.

Aktivitas produksi yang berkaitan dengan sumber daya perusahaan dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pihak internal maupun eksternal perusahaan, terutama aktivitas produksi yang dilakukan perusahaan manufaktur. Terlebih perusahaan manufaktur yang memproduksi barang menggunakan sumber daya alam. Pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah dan lain sebagainya merupakan dampak negatif yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan merusak lingkungan.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap sosial dan lingkungan atas dampak kegiatan operasional perusahaan. Tindakan perusahaan dalam rangka memberikan tanggung jawabnya kepada *stakeholders* yang berkepentingan dan lingkungan sekitar merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 74 menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban bagi perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam dan jika perseroan tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap perusahaan wajib menerapkan program CSR demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainability*) hidup perusahaan.

Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggung jawab komite audit adalah mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, serta memeriksa ulang laporan

keuangan apakah sudah sesuai dengan standar, kebijaksanaan dan konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit. Semakin banyak anggota komite audit yang dimiliki, kontrol terhadap kinerja sosial perusahaan akan semakin besar sehingga memperluas pengungkapan tanggung jawab sosialnya.

Dewan direksi sebagai elemen tertinggi dari pihak manajemen bertanggung jawab atas perolehan legitimasi dari seluruh pemangku kepentingan. Ukuran dewan direksi mencerminkan mekanisme tata kelola perusahaan karena pengambilan keputusan direksi akan mempertimbangkan pendapat anggota direksi. Semakin banyak dewan direksi, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk melaksanakan CSR.

Dewan komisaris merupakan bagian dari perusahaan yang berwenang untuk melakukan pengawasan serta memberikan pengarahan atau petunjuk yang berkaitan dengan laporan tahunan yang disajikan oleh direksi atau manajemen. Keberadaan dewan komisaris independen dapat mengungkapkan informasi secara luas kepada para pemangku kepentingan karena bersifat independen dan terbebas dari berbagai kepentingan sehingga dapat memberikan saran senetral mungkin. Semakin besar proporsi dewan komisaris independen, maka akan semakin luas perusahaan akan mengungkapkan informasi. Dewan komisari independen dapat mendesak perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR secara lengkap dan transparan.

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari total modal saham perusahaan. Kepemilikan manajerial mendapat keuntungan khusus dari pemegang saham lainnya atas biaya CSR yang dikeluarkan. Tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi akan mempengaruhi besarnya tanggung jawab sosial, dimana semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial, maka semakin luas pula manajemen melakukan pengungkapan CSR.

Saat ini kepemilikan asing di Indonesia mengalami kenaikan pesat yang disebabkan era perdagangan bebas. Seperti diketahui, Indonesia ikut serta dalam beberapa organisasi ekonomi yang menetapkan aturan perdagangan bebas. Semakin tinggi tingkat kepemilikan asing maka akan semakin luas pengungkapan taggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian, secara umum kepemilikan asing di Indonesia juga memiliki kepentingan secara ekonomi lewat kekuasaan yang bersumber dari investasi.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh sebuah institusi. Pengawasan yang dilakukan oleh kepemilikan institusional tergantung pada besarnya investasi yang terkait. Tingkat kepemilikan yang tinggi akan menimbulkan pengawasan yang lebih besar daripada tingkat kepemilikan yang rendah. Dengan kepemilikan saham akan mendorong pengawasan kinerja manajemen yang lebih optimal. Investor institusi yang membeli saham untuk berinvestasi dengan prospek yang baik mendorong perusahaan melakukan pengungkapan CSR dengan baik dan terlihat menarik untuk berinvestasi dalam perusahaan tersebut.

Hubungan antara lingkungan dan perusahaan dapat dilihat melalui kinerja lingkungan. Perusahaan yang mengikuti program PROPER yang dicetuskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan lebih baik dalam melakukan pengungkapan CSR serta membuat perusahaan lebih unggul dibandingkan kompetitor. Tingkat kepercayaan masyarakat dan konsumen akan semakin besar yang merupakan hal positif bagi perusahaan dimasa sekarang dan mendatang.

Dalam kaitannya dengan CSR, tipe industri dapat dibedakan menjadi dua yaitu *high profile* dan *low profile*. *High profile* merupakan jenis industri yang berkaitan langsung dan mendapatkan perhatian dari masyarakat, sedangkan *low profile* adalah jenis industri yang kurang mendapat sorotan dari masyarakat. Hal tersebut dapat mempengaruhi pengungkapan CSR menurut pandangan masyarakat.

Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat karena adanya peran media. Melalui media pihak eksternal perusahaan dapat mengetahui aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut dapat menimbulkan kepercayaan dari berbagai pihak seperti *stakeholders*, konsumen, dan masyarakat. Selain itu, media juga dapat menarik investor agar mau menanamkan modal pada perusahaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
2. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
3. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?

5. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
7. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
8. Apakah tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
9. Apakah pengungkapan media berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh komite audit perusahaan terhadap pengungkapan CSR.
2. Menganalisis pengaruh dewan direksi terhadap pengungkapan CSR.
3. Menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR.
4. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan CSR.
5. Menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR.
6. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR.
7. Menganalisis pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan CSR.
8. Menganalisis pengaruh tipe industri terhadap pengungkapan CSR.
9. Menganalisis pengaruh pengungkapan media terhadap pengungkapan CSR.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi investor dan calon investor
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai laporan keuangan tahunan dan menambah pemahaman investor dan calon investor tentang tanggungjawab sosial serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan investasi.
2. Bagi pemerintah
Penelitian ini dapat dijadikan refrensi dalam menentukan kebijakan mengenai aspek-aspek CSR mana saja yang awalnya merupakan sebuah sukarela yang kemudian dapat dijadikan keharusan bagi seluruh perusahaan di Indonesia.
3. Bagi masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi bagi masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan perusahaan sehingga masyarakat dapat mengetahui hak-haknya yang harus diperoleh.

4. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk mengungkapkan CSR dan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan untuk melakukan tanggungjawabnya terhadap lingkungan.

E. Target Luarana Penelitian PID

Target luaran penelitian PID adalah artikel yang didesiminasikan pada The 12th URECOL tahun 2020 atau Seminar Nasional dan The 7th Call For Syariah Paper (SANCALL) 2020 di FEB UMS.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Sinyal

Menurut Siregar (2013) dalam rangka memperoleh modal dari pihak eksternal, perusahaan harus membagikan informasi-informasi yang dapat menarik minat atau perhatian para investor dan kreditur. Pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) memberikan sinyal kepada para pemangku kepentingan khususnya investor, kreditur, dan publik bahwa perusahaan mengelola manajemennya dengan baik. Sehingga dapat melakukan pengungkapan CSR secara lengkap, layak, dan transparan.

Pengungkapan CSR dapat memberi sinyal bukan hanya kepada para pemangku kepentingan tetapi juga untuk perusahaan dalam mengelola kinerja perusahaan yang berkelanjutan sehingga bisnis yang dijalankan akan bertahan dalam jangka panjang. Hal ini karena perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR akan memiliki hubungan baik dengan masyarakat dan pemerintah setempat.

Laporan CSR yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan bertujuan memberikan informasi sebagai bukti kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar sebagai wujud pertanggung jawaban perusahaan secara moral kepada pemilik saham publik.

B. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi yang dikemukakan oleh Supriyono (2018: 63) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen puncak, yaitu dewan komisaris dan direksi). Pemegang saham mengontrak manajemen puncak (dewan komisaris dan direksi) untuk bekerja demi tujuan atau kepentingan pemegang saham dimana pemegang saham akan memberikan wewenang kepada manajemen puncak dalam pembuatan keputusan untuk mencapai tujuan.

Apabila kedua belah pihak yaitu prinsipal dan agen telah menyetujui kontrak, maka akan memunculkan adanya konflik bahwa agen akan berperilaku curang demi keuntungan agen sendiri. Menurut Gudono (2012: 147) teori keagenan

memprediksi bahwa jika agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan prinsipal dan kepentingan agen dan prinsipal berbeda, maka akan terjadi konflik keagenan dimana agen akan melakukan tindakan untuk keuntungan dirinya yang dapat merugikan prinsipal. Biaya yang dikeluarkan atas tindakan tersebut disebut biaya keagenan. Biaya keagenan itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu *monitoring cost*, *residual cost*, and *bonding cost*.

Konflik keagenan yang terjadi dapat dikurangi dengan melakukan pengungkapan CSR. Semakin besar pengungkapan CSR akan membuat prinsipal lebih mudah mengetahui dan mengendalikan aktivitas yang telah dilakukan oleh pihak manajemen.

C. Teori Legitimasi

Menurut Ghazali dan Chariri (2007: 411) dalam kehidupan masyarakat yang dinamis, tidak terdapat sumber daya dan kebutuhan terhadap pelayanan yang bersifat permanen. Hal ini menyebabkan suatu perusahaan harus lolos uji legitimasi dan relevansi yang dapat membuat masyarakat bergantung terhadap perusahaan tersebut. Masyarakat akan merasa membutuhkan jasa atau barang yang diproduksi perusahaan dan perusahaan dapat membuat masyarakat serta pemerintah setempat betul-betul menerimanya.

Teori legitimasi merupakan suatu teori mengenai kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat serta pemerintah, perusahaan sebagai entitas bisnis yang menjalankan kegiatan operasionalnya menggunakan sumber daya di daerah tersebut. Kontrak sosial dimaksudkan agar perusahaan melakukan pengungkapan CSR secara berkelanjutan. Sehingga hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar berjalan dengan baik.

D. Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility adalah komitmen perusahaan dalam melakukan aktivitas berlandaskan hukum yang berlaku untuk menjalankan kewajiban berdasarkan keputusan dalam mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan kepentingan para *stakeholders* dan lingkungan sekitar perusahaan (Azheri, 2011: 28). Bowen (1953) dalam Mardikanto (2014: 86) mengemukakan

CSR sebagai kewajiban perusahaan dalam merumuskan kebijakan, membuat keputusan, dan nilai-nilai masyarakat.

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dalam Hadi (2011: 47) mengartikan *corporate social responsibility* sebagai komitmen bisnis yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan bekerja sama dengan karyawan, keluarga mereka, masyarakat setempat, dan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 pasal 15 (b) juga menyatakan bahwa setiap penanam modal diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Bentuk CSR Post (2002) dalam Hadi (2011: 61) terdiri dari tiga dimensi:

1. *Economic responsibility*, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan nilai bagi *stakeholder*, seperti meningkatkan laba, harga saham, pembayaran dividen, dan lain sebagainya.
2. *Legal responsibility*, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan.
3. *Social responsibility*, perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan para pemangku kepentingan.

Pengungkapan CSR diperoleh dari *Corporate Social Responsibility Index* (CSDI) dengan menggunakan standar pengungkapan GRI yang merupakan pedoman laporan keberlanjutan. Standar pengungkapan yang digunakan adalah indikator GRI G4. Indikator GRI G4 ini diluncurkan pada tahun 2013 yang terdiri dari 149 item pengungkapan CSR. Indikator-indikator dalam melakukan pengungkapan meliputi dimensi dan klasifikasi sebagai berikut: *environmental*, *community energy*, *employee*, *product*, dan lainnya.

Saat ini, semakin banyak perusahaan yang bergerak dalam bisnis sejenis, tiap perusahaan berusaha menampilkan sesuatu yang dapat membuat bisnis mereka lebih unggul dibanding perusahaan kompetitor. Pengungkapan *corporate social responsibility* secara lengkap dan layak serta mengikuti program dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yaitu PROPER dapat memberikan nilai lebih terhadap perusahaan yang melakukannya.

Informasi non-keuangan seperti melakukan pengungkapan *corporate social responsibility* serta mengikuti program PROPER dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dapat menarik perhatian investor. Investor meyakini hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat, regulator atau lingkungan dapat membuat perusahaan akan terus mengalami peningkatan. Dalam arti investor tidak akan rugi apabila menanamkan modalnya pada perusahaan.

E. Komite Audit

Komite Audit merupakan jumlah seluruh anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Komite audit diukur dengan menghitung jumlah anggota Komite Audit dalam suatu perusahaan yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan. Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggung jawab komite audit adalah memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal (KNKCG, 2002).

Dari gambaran sederhana mengenai tugas dan fungsi dari lembaga tersebut, sudah barang tentu, keberadaan komite audit menjadi sangat penting sebagai salah satu perangkat utama dalam penerapan CSR. Dalam tataran praktis, figur anggota komite audit yang mampu menjalankan tugas kesehariannya secara efektif tidak mudah ditemukan. Perlu kriteria khusus bagi seseorang yang akan menjabat sebagai ketua maupun anggota komite audit, mengingat tugas dan tanggung jawabnya sangat strategis.

Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 menyatakan bahwa paling sedikit jumlah komite audit sebanyak 3 orang anggota yang berasal dari komisaris. Jumlah komite audit yang lebih banyak akan memberikan kemudahan dalam hal mengontrol kinerja sosial perusahaan, sehingga dapat memperluas pengungkapan CSR

perusahaan. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) juga menyatakan bahwa setidaknya dibutuhkan kriteria khusus bagi seorang yang akan menjabat sebagai ketua ataupun anggota komite audit, melihat tugas dan tanggung jawabnya yang sangat penting dan strategis bagi kelangsungan hidup perusahaan.

F. Dewan Direksi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. Dewan direksi memiliki peran penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan yaitu untuk menentukan kebijakan yang akan dijalankan perusahaan serta perlindungan terhadap pihak investor dalam jangka pendek ataupun jangka panjang.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Nomor 33/PJOK.04/2014) anggota dewan direksi emiten atau perusahaan publik paling kurang terdiri dari dua orang anggota direksi. Dimana satu diantara anggota direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006) juga menjelaskan bahwa jumlah anggota direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

G. Dewan Komisaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 1 ayat 6 mengemukakan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Pada pasal 114 ayat 2 menegaskan bahwa setiap anggota dewan komisaris wajib beritikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Suatu perusahaan terutama perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota dewan komisaris. Dewan komisaris akan membantu dewan direksi dalam memberikan pengarahan terkait dengan laporan tahunan yang akan disajikan. Semakin banyak jumlah dewan komisaris akan memudahkan dalam mengendalikan dan mengawasi dewan direksi dalam mengungkapkan laporan tahunan yang didalamnya memuat pengungkapan CSR.

Berdasarkan teori keagenan, dewan komisaris merupakan perwakilan dari para pemegang saham dalam mengawasi kinerja perusahaan yang didalamnya memuat kinerja sosial perusahaan. Dewan komisaris sebagai pelaksana tertinggi perusahaan dan sebagai wakil dari pemegang saham mampu mempengaruhi luasnya pengungkapan CSR.

H. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris terdiri dari individu yang berasal dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan disebut dewan komisaris independen. Dengan keterlibatan dewan komisaris independen terhadap manajemen perusahaan diharapkan mampu membuat perusahaan mengungkapkan informasi secara luas kepada para pemangku kepentingan. Karena dewan komisaris independen akan bersikap netral terhadap dalam memberikan masukan kepada perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Informasi tersebut dapat berupa informasi keuangan atau informasi non-keuangan. Informasi keuangan meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan informasi non-keuangan berupa Pelaksanaan CSR, penyelenggaraan bakti sosial, laporan dewan direksi, laporan dewan komisaris, dan sebagainya. Informasi-informasi tersebut dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2017) seluruh perusahaan efek wajib memiliki komisaris independen. Persentase jumlah komisaris independen minimal 30% dari jumlah seluruh dewan komisaris. Apabila perusahaan hanya memiliki satu dewan komisaris, maka dewan komisaris dimaksud merupakan dewan

komisaris independen. Apabila terdapat dua dewan komisaris, maka salah satunya merupakan dewan komisaris independen.

I. Kepemilikan Manajerial

Teori agensi memunculkan kemungkinan adanya konflik antara pemegang saham dan pihak manajemen. Konflik tersebut dapat terjadi karena perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Pihak manajemen dapat mengurangi konflik keagenan apabila manajer mempunyai kepemilikan saham perusahaan, karena hal tersebut akan mencegah tindakan manajer untuk berbuat curang demi keuntungan pribadinya. Menurut Subagyo (2018: 46) kepemilikan manajerial merupakan instrumen yang digunakan untuk mengurangi konflik dari keagenan diantara beberapa tuntutan terhadap perusahaan.

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari total saham perusahaan yang beredar. Pihak manajemen merupakan pemegang saham yang juga berarti sebagai pemilik perusahaan karena manajer memiliki kepemilikan saham perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, manajer berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan yang akan diambil dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan keuntungan para pemegang saham.

Semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial maka diharapkan pihak manajemen akan bertindak sesuai dengan yang diinginkan pemegang saham. Hal tersebut membantu memudahkan pihak manajemen dalam membuat keputusan demi kepentingan perusahaan dengan melaksanakan dan mengungkapkan *corporate social responsibility*.

J. Kepemilikan Asing

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6 kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Perusahaan yang memiliki kontrak dengan *foreign stakeholder* maka perusahaan akan lebih didukung dalam pengungkapan CSR. Investor asing akan mendorong manajemen perusahaan untuk lebih transparan dalam pengungkapan laporan tanggung jawab sosial perusahaan dikarenakan adanya investasi yang ditanam oleh

pemodal asing. Dari sudut pandang *stakeholder* pengungkapan CSR memperlihatkan suatu perusahaan peduli terhadap lingkungan.

Kepemilikan asing dianggap salah satu yang paling *concern* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti diketahui, negara-negara di Eropa memperhatikan isu sosial misalnya, hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan lingkungan seperti efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air. Hal ini menjadikan perusahaan multinasional mengubah etika bisnisnya demi menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan. Peran kepemilikan asing tersebut diasumsikan bahwa tingkat investasi luar negeri yang lebih tinggi akan menunjukkan pengaruh yang lebih besar.

Kepemilikan asing melihat keuntungan dari sisi legitimasi para *stakeholders* berdasarkan *home market* sehingga memberikan eksistensi tinggi dalam jangka panjang. Hal ini menjadikan perusahaan yang memiliki kontrak dengan *foreign stakeholders* baik dalam *ownership* dan *trade* didukung dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, untuk menegaskan pengaruh kepemilikan asing terhadap CSR diperlukan identifikasi lebih lanjut mengenai orientasi investasi *stakeholders*. Dalam hal ini, investasi signifikan yang telah dibuat antara perusahaan dan *stakeholders*, investor asing cenderung menekan manajer dalam pengambilan keputusan agar tidak kehilangan investasi akibat kebangkrutan atau sanksi maupun hukum yang berlaku mengenai pertanggungjawaban sosial.

K. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan institusi (badan). Sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun. Adanya kepemilikan institusional mendorong kinerja manajemen lebih optimal karena kepemilikan saham merupakan salah satu sumber kekuasaan yang digunakan untuk mendukung kinerja manajemen. Dana besar dan kredibilitas tinggi dari investor institusional menjadi salah satu target perusahaan sehingga perusahaan akan melakukan pengungkapan CSR.

Kepemilikan institusional merupakan pemegang saham terbesar sehingga merupakan sarana dalam memonitor manajemen. Hal ini sejalan dengan keterlibatan peran investor institusional melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan organisasi, maupun investasi dalam perusahaan yang terlibat dengan bisnis investor. Sehingga investor memiliki insentif untuk terlibat dalam perusahaan daripada beralih investasi. Hal tersebut menjadi alasan investor untuk profitabilitas jangka panjang.

Hubungan dengan investor institusional meningkatkan tindakan CSR untuk dua alasan. Pertama, motif yang berperan karena reputasi sosial perusahaan merupakan indikator dari perilaku manajerial yang kompeten. Kedua, motif hubungan dan moral sebagai konsekuensi dari hukum-hukum sosial. Investor institusi menawarkan kepercayaan yang ditandai asimetri informasi signifikan antara investor institusional dan kliennya. Berinvestasi dalam bisnis sekaligus mempertahankan peringkat CSR dari perusahaan merupakan salah satu cara investor sebagai tanda kepada klien potensial bahwa investor institusi tersebut dapat diandalkan dan bertanggung jawab.

L. Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan. Di Indonesia permasalahan lingkungan bukanlah hal yang baru mengingat banyaknya kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari perusahaan-perusahaan yang mengambil sumber daya serta mencemari lingkungan sekitar dengan limbah industri, limbah pertanian, maupun limbah rumah tangga. Hal ini tidak luput dari pengawasan masyarakat maupun pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018), kinerja lingkungan dapat diukur dari program yang diluncurkan oleh kementerian yaitu, program lingkungan yang diberi nama Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang bertujuan untuk mendorong perusahaan untuk mengelola lingkungan hidup. Terdapat lima kategori dalam penilainya, yaitu:

Tabel II.1
Peringkat Program PROPER

Peringkat	Skor	Keterangan
Emas	5	Sangat Baik
Hijau	4	Baik
Biru	3	Cukup
Merah	2	Buruk
Hitam	1	Sangat Buruk

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018) aspek-aspek yang dijadikan perhitungan dalam melaksanakan program PROPER adalah: pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), penetapan sistem manajemen lingkungan (SML), konservasi dan pemanfaatan sumber daya, serta kegiatan sosial perusahaan.

Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan akan mengumumkan hasil program kinerja perusahaan setiap akhir tahun, diumumkan pada website resmi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan dapat diakses oleh publik. Hasil ini memberikan nilai lebih kepada perusahaan yang menjalankan program PROPER dengan layak. Perusahaan yang menjalankan program PROPER, akan lebih luas melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang dapat menarik para investor.

M. Tipe Industri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 1 berbunyi “Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri”. Industri merupakan suatu kegiatan yang mengolah bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang yang siap dijual dengan kualitas yang baik untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Dalam mengolah bahan baku, perusahaan harus memperhatikan lingkungan agar tidak tercemar limbah yang dihasilkan dengan menerapkan kegiatan pengungkapan CSR.

Tipe industri merupakan suatu karakteristik yang ada pada perusahaan meliputi bidang usaha, karyawan, risiko yang dimiliki, serta lingkungan. Tipe industri dibedakan menjadi dua, yaitu *high profile* dan *low profile*. *High profile* digambarkan sebagai perusahaan yang memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan, tingkat risiko politik yang tinggi serta tingkat kompetisi yang ketat. Hal tersebut membuat perusahaan mendapatkan sorotan *publik* dalam setiap aktivitasnya. Dengan adanya perhatian yang lebih dari publik, dapat membuat perusahaan untuk terus meningkatkan pengungkapan CSR

Berbeda dengan *high profile*, tipe *low profile* digambarkan sebagai perusahaan yang memiliki sensitivitas, tingkat *visibility costumer*, serta tingkat risiko politik yang rendah sehingga tidak terlalu mendapatkan sorotan dari masyarakat. Meskipun kurang mendapat sorotan dari *publik*, perusahaan harus tetap menerapkan *corporate social responsibility* untuk menjaga lingkungan serta reputasi perusahaan. Tipe *high profile* yaitu seperti perusahaan otomotif, penerbangan, minyak, ekstraktif, pertambangan, kimia, kehutanan, transportasi, serta makanan dan minuman. Sedangkan tipe *low profile* berupa perusahaan bangunan, keuangan dan perbankan, properti, peralatan medis, *retailer*, tekstil dan produk tekstil, serta produk rumah tangga.

N. Pengungkapan Media

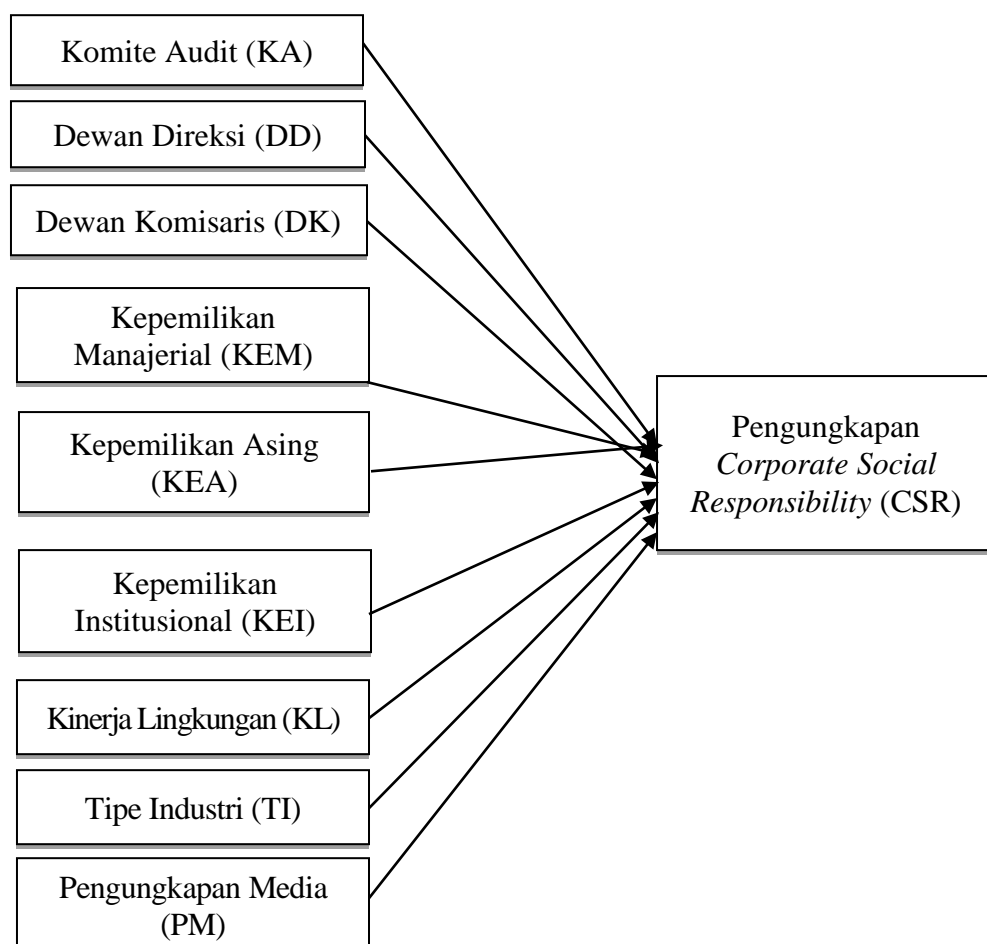
Media merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari satu orang atau perusahaan kepada yang lainnya. Media dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pengungkapan media merupakan suatu alat bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan kegiatan operasionalnya kepada para *stakeholder*. Media juga dapat digunakan perusahaan untuk mempublikasikan kegiatannya dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar.

Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar masyarakat semakin percaya kepada perusahaan. Dengan perusahaan mempublikasikan aktivitas sosial. Pengkomunikasian CSR melalui media akan membuat reputasi perusahaan semakin baik dimata masyarakat. Sehingga masyarakat akan membantu perusahaan untuk terus berkembang dimasa depan.

Salah satu media yang paling efektif yaitu dengan menggunakan internet. Dengan adanya internet perusahaan dapat lebih mudah untuk mengungkapkan CSR dengan mendapatkan dukungan dan legitimasi dari masyarakat. Sehingga dapat membantu perusahaan untuk terus bertahan dan bersaing dalam operasi bisnis sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga perusahaan dapat meningkatkan reputasinya serta mendapatkan pendanaan dari investor dan lembaga yang berkepentingan.

O. Kerangka Pemikiran

Berikut merupakan kerangka pemikiran yang disajikan dalam model penelitian mengenai determinan CSR dari perspektif non-keuangan yaitu struktur organisasi: komite audit, dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan meliputi: kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kinerja lingkungan, tipe industri, dan pengungkapan media terhadap pengungkapan CSR.



P. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh komite audit terhadap pengungkapan CSR.

Terkait pelaporan keuangan, peran dan tanggung jawab komite audit adalah memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan serta memastikan bahwa standar dan kebijakan keuangan yang berlaku terpenuhi, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku, dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal. Selain itu, komite audit juga mengawasi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, apakah sudah dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan.

Keberadaan komite audit diperusahaan merupakan mekanisme dalam GCG yang diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap manajemen dengan lebih baik dalam hal mewujudkan *responsibility* terhadap masyarakat dan lingkungan disekitar perusahaan. Sehingga keinginan pemegang saham untuk melaksanakan CSR dan mengungkapkannya kepada pihak eksternal sebagai bukti bahwa perusahaan telah melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dimasyarakat.

Komite audit secara tidak langsung akan mempengaruhi luasnya pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin banyak anggota komite audit maka akan semakin baik dalam melakukan pengungkapan CSR terkait aktivitas sosial dan lingkungan. Sebaliknya jika anggota komite audit terbatas, maka perusahaan akan memiliki celah untuk tidak melaporkan aktivitas sosialnya karena kurangnya pengawasan.

Hasil penelitian Restu, dkk. (2017), Klien (2001), McMullen (1996), Beasley (1996), Kalbers (1992) dan DeFond dan Jiambalvo (1991) memberikan bukti empiris bahwa komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis:

H1: Komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR

2. Pengaruh dewan direksi terhadap pengungkapan CSR.

Dewan direksi merupakan dewan yang memiliki kesamaan persepsi dengan dewan komisaris dalam hal visi, misi, dan nilai perusahaan. Dewan

direksi bertanggung jawab penuh dalam mengelola kinerja perusahaan secara internal maupun eksternal. Dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap pengungkapan CSR secara berkelanjutan untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.

Keberadaan dewan direksi sebagai elemen tertinggi dalam manajemen memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam pengelolaan laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, serta laporan pelaksanaan GCG. Dalam rangka mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan, dewan direksi harus dapat memastikan dipenuhinya CSR perusahaan, dan mempunyai perencanaan tertulis dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut.

Pengambilan keputusan oleh direksi perlu mendapat pertimbangan dari seluruh anggota direksi, sehingga ukuran dewan direksi dapat mencerminkan mekanisme tata kelola perusahaan. Semakin besar jumlah dewan direksi memberikan dampak positif terhadap kinerja dewan karena akan memberikan lebih banyak pengalaman dan keahlian. Hal ini menjadikan keputusan dewan direksi menjadi lebih baik, dan kemampuan untuk melaksanakan pengungkapan CSR oleh perusahaan menjadi semakin besar.

Hasil penelitian Pebriana dan Sukartha (2012) membuktikan secara empiris bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis:

H2: Dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan CSR

3. Pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR.

Dewan komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan bisnisnya dengan baik, mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan demikian, dewan komisaris mampu mempengaruhi pihak manajemen dalam mengungkapkan laporan tahunan terutama pengungkapan CSR.

Dewan komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang mempunyai tugas serta kewajiban yang sama. Perbedaannya dewan komisaris independen merupakan berasal dari luar perusahaan yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Keberadaan dewan komisaris

independen dapat membuat perusahaan melakukan pengungkapan CSR secara berkelanjutan untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.

Keberadaan dewan komisaris independen berasal dari eksternal perusahaan, yang tidak mempunyai hubungan bisnis dengan pemegang saham, dewan direksi, dewan komisaris, dan sebagainya. Dewan komisaris independen dapat bersikap netral baik dalam mengawasi aktivitas operasional maupun dalam memberikan nasihat kepada direksi. Karena sifatnya yang tidak terpengaruh oleh manajemen perusahaan, maka dewan komisaris independen mampu mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR secara luas dan lengkap.

Keberadaan dewan komisaris independen dimaksudkan agar perusahaan dapat membuat keputusan yang efisien, tepat, dan independen. Terlebih keputusan mengenai pengungkapan CSR, dewan komisaris independen akan mendorong perusahaan untuk melakukannya secara luas dan lengkap. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk kepentingan para pemangku kepentingan tetapi untuk keberlangsungan perusahaan. Karena pengungkapan CSR dapat menjadi investasi perusahaan dimasa mendatang.

Hasil penelitian Fauzyyah dan Sistya (2018), Setyarini dan Melvie (2011), dan Cornett, *et al.* (2009) memberikan bukti empiris bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis:

H3: Dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR

4. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan teori agensi, konflik keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dan pemegang saham. Kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen. Pihak manajemen akan melakukan pengungkapan CSR dalam rangka meningkatkan *image* perusahaan karena manajer bertindak sebagai pemegang saham sekaligus pemilik perusahaan.

Kepemilikan manajerial mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara pihak pemegang saham dan pihak manajemen, sehingga pihak manajemen tidak akan melakukan kecurangan demi kepentingan pribadi. Adanya kesamaan kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen

akan memotivasi pihak manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan melaksanakan dan mengungkapkan CSR. Pihak manajemen yang memiliki saham perusahaan berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan untuk mengungkapkan CSR. Pengungkapan CSR ini dilakukan dalam rangka menjaga keberlangsungan hidup perusahaan hingga di masa mendatang.

Hasil penelitian Annisa dan Nera (2019) serta Karima (2014) membuktikan secara empiris bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis:

H4: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan CSR

5. Pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR.

Kepemilikan asing dalam perusahaan dianggap yang paling *concern* terhadap pengungkapan CSR. Perusahaan yang memiliki kontrak bisnis dengan kepemilikan asing akan lebih terdorong untuk mengungkapkan CSR. Peran kepemilikan asing menunjukkan pengaruh yang besar terhadap kinerja manajemen perusahaan dikarenakan tingkat investasi yang lebih tinggi daripada tingkat investasi oleh investor dalam negeri. Hal ini disebabkan investor asing menuntut kerja keras sehingga dapat memberikan pengembalian investasi yang besar pula.

Adanya saham yang dimiliki oleh investor asing dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Saham kepemilikan asing yang persentasenya cukup besar akan menggeser manajemen yang dikelola oleh pemerintah. Dengan demikian, kepemilikan asing akan mengurangi keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan operasi bisnis suatu perusahaan. Melalui tingkat kepemilikan asing yang semakin tinggi akan mempengaruhi luas pengungkapan CSR perusahaan.

Perusahaan didirikan tidak hanya mengutamakan kepentingan perusahaan sendiri namun juga memperhatikan kepentingan para *stakeholder*, salah satunya adalah kepemilikan asing. Kepemilikan asing juga terkait dengan teori keagenan bahwa dalam suatu perusahaan akan terdapat konflik hubungan dalam kepentingan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan, tetapi ketika hubungan dapat dikendalikan maka kinerja perusahaan dan pengelolaan CSR menjadi lebih baik.

Penelitian Budiman (2015) memberikan bukti secara empiris bahwa kepemilikan asing menuntut perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya karena banyak investor asing yang membutuhkan informasi tanggung jawab sosialnya. Menurut teori agensi penelitian menemukan fakta bahwa kepemilikan asing dapat memonitor kinerja perusahaan menjadi lebih baik sehingga menghasilkan informasi secara menyeluruh bagi *stakeholder* perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis:

H5: Kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan CSR

6. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun. Melalui kepemilikan institusional akan mendorong pengawasan kinerja manajemen perusahaan lebih optimal. Investor institusional memiliki kekuatan dan pengalaman dalam melindungi hak serta kepentingan para pemegang saham. Sehingga para investor institusi cenderung untuk membeli saham yang mempunyai prospek baik untuk jangka panjang.

Umumnya investasi dana besar didapatkan dari investor institusional. Oleh karena itu, perusahaan berusaha mengungkapkan praktik CSR dengan baik agar terlihat memiliki prospek yang baik untuk jangka panjang sehingga menarik investor institusional. Hal ini menunjukkan bahwa investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan untuk pengembangan usahanya.

Kepemilikan institusional tidak terpisahkan dari struktur kepemilikan sehingga dalam kuasa pengawasannya digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Kebijakan untuk menjaga perusahaan dapat berjalan dengan baik serta berkelanjutan dapat dituangkan dalam bentuk ketentuan seperti pelaksanaan praktik CSR.

Hasil penelitian Budiman (2015) dan Rahmawati, dkk (2010) memberikan bukti secara empiris bahwa kepemilikan institusional yang besar pengaruh terhadap pelaksanaan CSR. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aset perusahaan. Hal ini berarti akan mencegah pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Semakin suatu perusahaan mampu menjaga kinerja manajemennya selama pelaksanaan CSR

maka kapabilitas praktik CSR akan semakin meningkat. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H7: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR

7. Pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan CSR.

Perusahaan yang mengikuti program PROPER, akan cenderung melaksanakan pengungkapan CSR. Terlebih perusahaan yang memiliki peringkat PROPER yang lebih baik, mereka akan melakukan pengungkapan CSR secara luas dan lengkap. Melakukan kinerja lingkungan merupakan salah satu cara perusahaan untuk menarik perhatian para pemangku kepentingan selain dengan melakukan pengungkapan CSR. Kinerja lingkungan dapat mengurangi dampak dari kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan, dan sebagai wujud perhatian perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat, serta sebagai upaya menciptakan perusahaan yang berkelanjutan.

Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik, dapat menarik perhatian para investor karena dianggap mampu mengungkapkan informasi yang luas dan lengkap kepada publik. Hubungan antara kinerja lingkungan dengan pengungkapan CSR merupakan kontrak sosial perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan serta tanggung jawab kepada masyarakat sekitar.

Hasil penelitian Damanik dan Yadnyana (2017) dan penelitian Agustami dan Hidayat (2015) memberikan bukti empiris bahwa kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H8: Kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR

8. Pengaruh tipe industri terhadap pengungkapan CSR.

Perusahaan dikategorikan menjadi dua, yaitu *high profile* dan *low profile*. Perusahaan *high profile* merupakan tipe perusahaan yang mendapatkan sorotan lebih dari masyarakat, dibandingkan dengan *low profile* yang kurang mendapat sorotan dari masyarakat. Perusahaan tersebut menjadi pusat perhatian masyarakat atas aktivitas yang dilakukan dan memiliki kemungkinan yang besar untuk berhubungan langsung dengan masyarakat. Hal tersebut dapat dijadikan perusahaan untuk melakukan kegiatan pengungkapan CSR.

Hal ini dapat memacu perusahaan untuk lebih memberikan informasi kepada masyarakat. Sekaligus untuk terus mempublikasikan aktivitas sosial perusahaan kepada masyarakat umum. Ini dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat karena bisa menjalankan aktivitas ekonomi, sosial, serta menjaga lingkungan dengan baik. Perusahaan juga dapat meningkatkan reputasi dimasyarakat dengan melakukan CSR.

Perusahaan membutuhkan pengakuan dari masyarakat. Untuk mendapatkan pengakuan tersebut, perusahaan harus memiliki keberpihakan terhadap masyarakat dengan cara menjaga komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan *high profile* dipandang mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga diharapkan perusahaan lebih mengkomunikasikan tentang pengungkapan CSR secara luas kepada *stakeholder* maupun masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Respati dan Hadiprajitno (2015) bahwa tipe industri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CSR. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Prasetyono (2014) yang menyatakan bahwa tipe industri berpengaruh positif terhadap CSR. Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H8 : Tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan CSR

9. Pengaruh pengungkapan media terhadap pengungkapan CSR.

Media merupakan sarana komunikasi yang penting bagi perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Melalui media semua pihak, baik pihak internal maupun eksternal dapat mengetahui informasi tentang perusahaan. Media juga salah satu sarana yang menjadi sorotan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Salah satu informasi yang dibutuhkan yaitu adanya pengungkapan CSR

Adanya media, perusahaan dapat berbagi segala aktivitas sosial kepada masyarakat atau pihak yang berkepentingan. Hal tersebut, dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan reputasi perusahaan menjadi lebih baik dimata para pemangku kepentingan. Salah satu media yang sering diakses yaitu internet. Media internet

dapat membantu perusahaan untuk mengkomunikasikan operasional bisnis serta pengungkapan CSR kepada pihak *stakeholder* maupun masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Plorensia dan Hardiningsih (2015) menyatakan bahwa *media exposure* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Pendapat tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Respati dan Hadiprajitno (2015) bahwa pengungkapan media berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis:

H9: Pengungkapan media berpengaruh terhadap pengungkapan CSR

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kuantitatif, jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dalam bentuk hubungan kausal. Hubungan kausal merupakan hubungan yang bersifat sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2010: 56).

B. Teknik Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 dan didapatkan informasinya dari www.sahamok.com serta www.idx.co.id.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, peneliti menggunakan kriteria sampel, sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
2. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) secara lengkap dan berturut-turut dengan satuan rupiah selama 2015-2019.
3. Laporan keuangan menghasilkan laba secara berturut-turut selama 2015-2019.

C. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau pihak lain. Data penelitian ini berupa laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan yang berhubungan dengan variabel yang terdapat dalam penelitian. Data di perolehan melalui informasi pada Bursa Efek Indonesia. Data tersebut diperoleh dari website www.idx.co.id, www.sahamok.com, dan website perusahaan selama periode 2015-2019.

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Global Reporting Initiative* (GRI) G4 dengan keseluruhan item yang diungkapkan sebanyak 149 item.

Jika perusahaan melakukan pengungkapan CSR diberi skor 1 dan jika perusahaan tidak melakukan pengungkapan CSR sesuai dengan indikator GRI, diberi skor 0. Rumus untuk menghitung pengungkapan CSR menurut Restu, *et al.* (2017) adalah sebagai berikut: $CSRDI_j = \frac{\sum XI_j}{n_j}$

Keterangan:

$CSRDI_j$ = *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* Perusahaan j

$\sum XI_j$ = Jumlah item CSR yang diungkapkan 1 = jika item I diungkapkan;
dan 0 = jika item I tidak diungkapkan, maka $0 < CSRDI_j < 1$

n_j = Jumlah item perusahaan j, $n_j = 149$ item

2. Komite Audit (AUD)

Komite audit merupakan unsur dalam *corporate governance* yang bertugas untuk membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektifitas internal dan eksternal audit. Semakin banyak anggota komite audit yang dimiliki, kontrol terhadap kinerja sosial perusahaan akan semakin besar sehingga memperluas pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Dalam penelitian ini ukuran komite audit diukur dari jumlah anggota komite audit dalam laporan tata kelola perusahaan.

AUD = Jumlah Komite Audit Perusahaan pada Akhir Periode Tertentu

3. Direksi (DIR)

Dewan direksi memainkan peran besar dalam mengawasi dan mengarahkan para manajer untuk memuaskan keinginan *stakeholders*. Keefektifan pengawasan dewan direksi juga bergantung pada jumlahnya. Dalam penelitian ini ukuran dewan direksi diukur dari jumlah direksi yang dimiliki oleh perusahaan.

DIR = Jumlah Dewan Direksi Perusahaan pada Akhir Periode Tertentu

4. Dewan Komisaris (DKI)

Ukuran dewan komisaris independen merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh adanya dewan komisaris independen terhadap pengungkapan CSR. Semakin besar pengaruh dewan komisaris independen terhadap manajemen perusahaan maka semakin luas dan lengkap pula pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan.

$$DKI = \text{Jumlah Dewan Komisaris Independen} / \text{Dewan Komisaris independen} \times 100\%$$

5. Manajerial (KM)

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen dalam suatu perusahaan. Variabel kepemilikan manajerial ini diukur dengan menggunakan perbandingan antara jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen dengan jumlah lembar saham yang beredar.

$$KM = \text{Jumlah Kepemilikan Saham Manajerial} / \text{Jumlah Saham Perusahaan} \times 100\%$$

6. Kepemilikan Asing (KA)

Kepemilikan saham asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Dalam penelitian ini pengukuran indikator kepemilikan asing diukur dari rasio (%) jumlah saham yang dimiliki investor asing terhadap jumlah total saham yang beredar:

$$KA = \text{Jumlah Kepemilikan Saham Asing} / \text{Jumlah Saham Perusahaan} \times 100\%$$

7. Kepemilikan Institusional (KI)

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi (badan). Dalam penelitian ini variabel diukur dengan menggunakan rasio jumlah saham yang dimiliki institusi terhadap jumlah saham yang beredar.

$$KI = \text{Jumlah Kepemilikan Saham Institusional} / \text{Jumlah Saham Perusahaan} \times 100\%$$

8. Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan merupakan salah satu indikator mengenai kepedulian serta tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2002. Pengukuran kinerja lingkungan dapat dilakukan dengan memberikan peringkat

dalam penilaiannya, yaitu: skor 5 bagi perusahaan yang mendapatkan peringkat emas, skor 4 untuk peringkat hijau, skor 3 untuk peringkat biru, skor 2 untuk peringkat merah, skor 1 untuk peringkat hitam, dan skor 0 bagi perusahaan yang tidak mengikuti program PROPER.

9. Tipe Industri

Tipe industri diproksikan menjadi dua, yaitu *high profile* dan *low profile*. Perusahaan yang termasuk dalam kategori *high profile* meliputi, perusahaan otomotif, penerbangan, minyak, ekstraktif, pertambangan, kimia, kehutanan, transportasi, serta makanan dan minuman. Sedangkan kategori *low profile* yaitu perusahaan bangunan, keuangan dan perbankan, peralatan medis, properti, *retailer*, tekstil dan produk tekstil, serta produk rumah tangga. Tipe industri diukur dengan menggunakan *variabel dummy* yaitu dengan memberikan angka 1 pada perusahaan *high profile* dan 0 pada perusahaan *low profile*.

10. Pengungkapan Media

Pengungkapan media merupakan suatu cara yang dapat digunakan perusahaan untuk lebih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dengan mengungkapkan kegiatan sosial kepada pihak eksternal perusahaan. Pengukuran pengungkapan media dilakukan dengan variabel dummy, yaitu dengan memberikan angka 1 pada perusahaan yang mengungkapkan kegiatan CSR kepada media eksternal. Sedangkan, angka 0 diberikan kepada perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR pada media eksternal.

E. Metode Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik umum yang digunakan sebagai dasar pengujian sebelum melakukan pengujian hipotesis. Menurut Siregar (2014: 125) uji statistik dalam analisis deskriptif bertujuan menguji serta menganalisis hipotesis penelitian yang bergantung dari skala pengukurannya, seperti skala nominal, skala ordinal, dan skala interval (rasio).

2. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji Normalitas, Penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* dengan nilai signifikansi 0,05. Kriterianya adalah apabila nilai *Kolmogorov Smirnov* $> 0,05$ maka dapat diinterpretasikan bahwa nilai residual terdistribusi

normal. Tetapi apabila nilai *Kolmogorov Smirnov* $< 0,05$ maka nilai residual tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2011: 165).

- b. Uji Multikolinearitas, Ghozali (2011: 106) terdapat beberapa metode pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance Value* pada model regresi, apabila $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,1$ maka model regresi tidak memiliki penyimpangan dalam asumsi klasik multikolinearitas, membandingkan nilai koefisien determinasi individual dengan nilai determinasi secara keseluruhan, serta melihat nilai *eigenvalue* dan *condition index*.
- c. Uji Heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji *Glejser* dalam mendeteksi heteroskedastisitas dengan menggunakan tingkat signifikansi. Heteroskedastisitas terjadi apabila nilai signifikansi $< 0,05$, sedangkan homokedastisitas terjadi apabila nilai signifikansi $> 0,05$.
- d. Uji Autokorelasi, penelitian ini menggunakan metode *Durbin Watson* (DW). Menurut (Ghozali, 2011:112) ketentuan autokorelasi dengan menggunakan metode *Durbin Watson*.

3. Uji Hipotesis

- a. Uji Analisis Regresi Linear Berganda, Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: $CSR = \alpha + \beta_1 KA + \beta_2 DD + \beta_3 DK + \beta_4 KM + \beta_5 KA + \beta_6 KI + \beta_7 KL + \beta_8 TI + \beta_9 PM + \epsilon$

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_9$ = Koefisien Regresi

KA = Komite Audit

DD = Dewan Direksi

DK = Dewan Komisaris Independen

KM = Kepemilikan Manajerial

KA = Kepemilikan Asing

KI = Kepemilikan Institusional

KL = Kinerja Lingkungan

TI = Tipe Industri

PM = Pengungkapan Media

ϵ = error term

b. Uji F

Ghozali (2011: 98) uji F pada umumnya digunakan untuk menguji apakah model tersebut fit atau tidak. Kriteria yang digunakan dalam menguji ketepatan model adalah apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan/atau nilai signifikansi $< 0,05$.

c. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Ghozali (2011: 97) koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur besarnya kemampuan model regresi dalam menerangkan *variance* dari variabel terikat (variabel dependen). Keterbatasan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen merupakan hasil dari nilai koefisien determinasi (R^2) yang kecil. Pada dasarnya nilai R^2 untuk data *crossection* relatif rendah dibandingkan dengan data *time series*. Koefisien determinasi (R^2) akan meningkat seiring dengan penambahan variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1.

d. Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011: 98). Untuk menguji hipotesis ini digunakan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima atau H_a ditolak, yang menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas secara individu tidak mempengaruhi variabel dependen atau terikat.
- 2) Jika nilai probabilitas lebih kecil 0,05 maka H_0 ditolak atau H_a diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas secara individual mempengaruhi variabel dependen atau terikat.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

A. Anggaran Biaya

1. Honor				
Pelaksana	Honor/Jam (Rp)	Waktu (Jam/Minggu	Minggu	Jumlah (Rp)
Ketua	10.000	4	20	800.000
Anggota 1	5.000	4	20	400.000
Anggota 2	5.000	4	20	400.000
Sub Total (Rp)				1.600.000
2. Operasional Penunjang				
Material	Rincian		Jumlah (Rp)	
Stationery	3 Orang x 1 Pkt x Rp 200.000,00		600.000	
Transportasi	3 Orang x 6 kl x Rp 50.000,00		900.000	
Komunikasi dan Internet	3 Orang x 1 pkt x Rp 200.000,00		600.000	
Sub Total (Rp)			2.100.000	
3. Pembuatan Laporan				
Material	Rincian		Jumlah (Rp)	
Pembuatan Laporan Hasil	1 Paket x Rp 300.000,00		300.000	
Sub Total (Rp)			300.000	
Total Anggaran yang Diperlukan (Rp)			4.000.000	

B. Jadwal Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pembuatan Proposal dan Pengajuan	x											
2.	Diskusi Ketua dan Anggota	x	x	x	x	x	x						
3.	Pengumpulan Data	x	x	x									
4.	Persiapan Uji Model Penelitian			x									
5.	Analisa Data				x								
6.	Hasil Analisa Data				x								
7.	Pelaporan Hasil Penelitian					x							
8.	Seminar dan atau Simposiun Hasil Penelitian dan Publikasi							x	x	x	x		

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Cut Dinda dan Nera Marinda Machdar. 2019. *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Kalbisocio Jurnal Bisnis dan Komunikasi, Vol. 6, No. 1, ISSN: 2356-4385.
- Azheri, Busyra. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Badjuri, Achmad. 2011. *Faktor-Faktor Fundamental, Mekanisme Corporate Governance, Pengungkapan Coorporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Manufaktur dan Sumber Daya Alam di Indonesia*. Dinamika Keuangan dan Perbankan, Mei 2011, Hal: 38-54 Vol. 3, No. 1, ISSN: 1979-4878.
- Beasley, M. 1996. *An Empirical Analysis Of The Relation Between The Board Of Director Composition And Financial Statement Fraud*. The Accounting Review. Vol. 71. (Hal 443-465).
- Budiman, Nita Andriyani. 2015. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggungjawab Sosial (Studi Empiris pada Perusahaan Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 – 2013)*. JRMB Prodi Akuntansi. UMB Yogyakarta. Volume 1 Nomor 1. ISSN : 2460-1233.
- Bursa Efek Indonesia. www.idx.co.id
- Cornett, M.M., McNutt, J. J., Tehranian, H. 2009. *Corporate Governance and Earnings Management at Large US Bank Holding Companies*. Journal of Corporate Finance. Volume 15.
- DeFond, M.L., Jiambalvo, J. (1991). *Incidence and Circumstances of Accounting Errors*. The Accounting Review. Vol. 66. No. 3. (Hal. 643-655).
- Fauzyyah, Raphita dan Sistya Rachmawati. 2018. *The Effect of Number of Meetings of The Board of Commissioners, Independent Commissioners, Audit Committee And Ownership Structure Upon The Extent of CSR Disclosure*. The Accounting Journal. Vol. 03 No. 02 E-ISSN: 2580-1481.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- GRI. 2013. *Sustainability Reporting Guidelines*. <https://www.globalreporting.org>
- Gudono. 2012. *Teori Organisasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Kalbers, L. P. 1992. *An Examination of the relationship between audit committees and external auditors*. The Ohio CPA Journal, (Hal. 19-27).
- Karima, Naila. 2014. *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Widya Warta No. 02 Tahun XXXV III/ Juli 2014, ISSN 0854-1981.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. *Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan* www.menlhk.go.id.
- Klien, A. 2002. *Audit Committee, Board of Director Characteristics and Earnings Management*. Journal Accounting and Economics (33), (hal. 375-400).

- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia* www.knkg-indonesia.org.
- Mahardikanto, Totok. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- McMullen, D.A. 1996. *Audit Committee Performance: An Investigation of the Consequences Associated with Audit Committes*. Auditing: A Journal of Practice & Theory. Vol. 15, No. 1, (Hal. 88-103).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek* www.ojk.go.id.
- Pebriana, Kadek Umi Sukma dan Sukartha, I Made. 2012. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Umur Perusahaan, Komposisi Dewan Direksi dan Kepemilikan Institusional Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Bursa Efek Indonesia*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Pradnyani, I Gusti Agung Arista, dan Eka A. Sisdyani. 2015. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Dewan Komisaris pada Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 11.2 (2015): 384-397, ISSN: 2302-8556.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kepemilikan Institusional.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6 tentang Kepemilikan Asing.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Diakses 19 Agustus 2019. <https://www.ojk.go.id>
- Restu, Muhammad. *et al.* 2017. *Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility*. E-Proceeding of Management: Vol.4, No.3 Desember 2017: 2742, ISSN : 2355-9357.
- Saham OK. www.sahamok.com.
- Setyarini, Yulia dan Melvie Paramitha. 2011. *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility*. Jurnal Kewirausahaan. Volume 5 Tahun 2011 ISSN: 1978-4724.
- Siregar, Ivana. 2013. *Hubungan Antara Kinerja Lingkungan dan Kinerja Komite Audit dengan Kualitas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (pada Perusahaan Manufaktur di BEI)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume 4 2013.
- Subagyo, dkk. 2018. *Akuntansi Manajemen Berbasis Desain*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono, R.A. 2018. *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : Drs. Agus Endro Suwarno, M.Si
 NIK/NIDN : 491/06-1110-5901
 Tempat/Tanggal Lahir : Purbolinggo, 11 Oktober 1959
 Jabatan Akademik : Lektor
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Surakarta
 Alamat : Jl. A Yani Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo
 Pangkat/Golongan/NIK : Penata / III C
 Alamat : Krapyak RT 03 RW VII, Pucangan, Kartasura
 Telpon : +62-857-8672-5608
 Alamat e-mail : aes202@ums.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Program	Jurusan / Prodi	Perguruan Tinggi	Tahun lulus
S 1	Akuntansi	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	5 November 1987
S 2	Program Magister Akuntansi	Universitas Diponegoro Semarang	28 April 2004

JURNAL PENELITIAN

No.	Jurnal	Edisi	Status Jurnal	Judul
1.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Jurusan Akuntansi FE UMS	Volume 1, No. 2 September 2002	ISSN 1411-6510	Review Atas Earning Manajemen dan Implikasinya dalam Standar Setting
2.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Jurusan Akuntansi FE UMS	Volume 2, No. 2 September 2003	ISSN 1411-6510	Membangun Standar Akuntansi Islam dari Perpektif Zakat
3.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Jurusan Akuntansi FE UMS	Volume 3, No. 2, September 2003	ISSN 1411-6510	Manfaat Informasi Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba (Studi Empiris terhadap Perusahaan Manufaktur Go Publik di BEJ)
4.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Jurusan Akuntansi FE UMS	Volume 3, No. 1, April 2004	ISSN 1411-6510	Pengendalian Intern dalam Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer

5.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Jurusan Akuntansi FE UMS	Volume 4, No. 1, April 2005	Terakreditasi SKNo:26/DIKTI/Kep./2005	Rasio Keuangan Sebagai Prediksi Kegagalan pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa di Indonesia
6.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Jurusan Akuntansi FE UMS	Volume 5, No. 1, April 2006	Terakreditasi No:26/DIKTI/Kep./2005	Analisis Kinerja Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Otonomi daerah Ditinjau Aspek Keuangan (Studi Empiris pada Wilayah Karesidenan Surakarta)

PENGALAMAN PENELITIAN

No.	Tahun	Judul Penelitian	Kedudukan
1.	2006	Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris di Wilayah Kantor Pelayanan PBB Surakarta)	Anggota
2.	2009	Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik (Studi Empiris pada DPRD Kab. Klaten Jawa Tengah)	Ketua
3.	2019	Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris DI Bursa Efek Indonesia)	Ketua

PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Tahun	Judul Pengabdian Masyarakat	Tempat
1.	2006	Penerapan Akuntansi Modern Untuk Perbaikan Administrasi pada CV "Taufik" di Boyolali, Surakarta	CV "Taufik" di Boyolali, Surakarta

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam **Curriculum Vitae** ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Surakarta, 3 Februari 2020
Hormat Saya,



Drs. Agus Endro Suwarno, M.Si

CURICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Alfina Shinta Dilas Chaniago
 NIM : B200160151
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat, Tanggal Lahir: Batam, 25 Juni 1997
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Kesehatan : Baik
 Agama : Islam
 Alamat Lengkap : Dusun Siambalau Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi,
 Kota Sawahlunto, Padang Sumatera Barat 27427
 Status : Belum Kawin
 No. Telepon / HP : 081329669625
 E-mail : alfinaschaniago@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

2003 – 2009 : SDN 01 Talawi Mudik
 2009 – 2012 : SMP Negeri 03 Sawahlunto
 2012 – 2015 : SMA Negeri 02 Sawahlunto
 2015 – Sekarang : Program S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah
 Surakarta

Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Prodi Gizi tahun 2015 – 2016
2. PORSEMA by BEM Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015 (selama 6 bulan)
3. IPPEMTA (Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Talawi) 2012 – sekarang

Hard Skill

- Menguasai Ms.Office (Word, Excel dan Power Point)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Surakarta, 02 Februari 2020

Hormat Saya,



Alfina Shinta D.C

CURICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Siwi Dwi Kusumaningsari
 NIM : B 200 160 152
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 15 Desember 1997
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Kesehatan : Baik
 Agama : Islam
 Alamat Lengkap : Ngestiharjo Rt 07 Rw 08 Siswodipuran Boyolali 57311
 Status : Belum Kawin
 No. Telepon / HP : 0822-4751-8390
 Email : siwi.kusuma45@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

2004 - 2010 : SDN 1 Siswodipuran Boyolali
 2010 - 2013 : SMP Negeri 6 Boyolali
 2013 - 2016 : SMA Negeri 3 Boyolali
 2016 - Sekarang : Program S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pengalaman Organisasi

Anggota Patroli Keamanan Sekolah (PKS) Tahun 2013-2016
 Anggota Organisasi Intra Sekolah (OSIS) Tahun 2013-2016

Hard Skill

Menguasai Ms. Office (Word, Excel, dan Power Point)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 02-02-2020

Hormat Saya,



Siwi Dwi Kusumaningsari